



## Jejaring Kebijakan sebagai Strategi Inovasi Kebijakan Publik di Kabupaten Bandung

Rizky Ilhami

Universitas Padjajaran

[rizkyilhami@unpad.ac.id](mailto:rizkyilhami@unpad.ac.id)

**Abstract:** Public policy innovation is an important necessity for local governments in responding to the complexity of public issues. One relevant approach to encourage policy innovation is policy networks, which emphasize collaboration between government and non-government actors. This study aims to analyze the role of policy networks as a public policy innovation strategy in Bandung Regency. The study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies of actors involved in the public policy innovation process. The results show that public policy innovation in Bandung Regency is not yet fully supported by an inclusive and sustainable policy network. The dominance of the local government, weak coordination between actors, limited capacity of non-governmental actors, and regulatory and bureaucratic barriers are the main obstacles. This study emphasizes that strengthening collaborative, participatory, and institutionalized policy networks is an important prerequisite for promoting adaptive and sustainable public policy innovation at the local level.

**Keywords:** policy network, public policy innovation, collaboration, Bandung Regency

**Abstrak:** Inovasi kebijakan publik menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam merespons kompleksitas permasalahan publik. Salah satu pendekatan yang relevan untuk mendorong inovasi kebijakan adalah jejaring kebijakan, yang menekankan kolaborasi antaraktor pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jejaring kebijakan sebagai strategi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses inovasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya ditopang oleh jejaring kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dominasi pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah, serta hambatan regulasi dan birokrasi menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan jejaring kebijakan yang kolaboratif, partisipatif, dan terinstitusionalisasi merupakan prasyarat penting untuk mendorong inovasi kebijakan publik yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

**Kata kunci:** jejaring kebijakan, inovasi kebijakan publik, kolaborasi, Kabupaten Bandung

### 1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas masalah publik mengharuskan pemerintah daerah bergerak melampaui pendekatan kebijakan hierarkis tradisional dan merangkul inovasi kebijakan publik. Pergeseran ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (Syuaib, 2023). Jaringan kebijakan memainkan peran penting dalam konteks ini, karena mereka memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi swasta, dan kelompok masyarakat, sehingga mendorong inovasi kebijakan publik (Ulfa & Frinaldi, 2025). Dengan memanfaatkan jaringan ini, pemerintah daerah dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya, yang mengarah ke proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif (Patria & Suwarta, 2024). Selanjutnya, reformasi pemerintah daerah, yang mencakup desentralisasi dan

tata kelola partisipatif, sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi inovasi (Sukandi,A,2024).

Jaringan kebijakan sangat penting untuk membina hubungan yang saling bergantung di antara berbagai aktor dalam proses kebijakan, memungkinkan pemerintah daerah untuk berkolaborasi secara efektif dengan entitas non-pemerintah seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi ini memfasilitasi berbagi sumber daya dan keahlian, yang sangat penting untuk menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan kebijakan yang kompleks (Ilhami, 2023) . Melalui berbagi pengetahuan dan pertukaran, jaringan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk belajar satu sama lain, meningkatkan potensi inovasi kebijakan publik (Ilhami, 2023) . Dengan menyatukan beragam perspektif dan mendorong eksperimen, jaringan kebijakan tidak hanya meningkatkan hasil kebijakan tetapi juga mempromosikan keterlibatan warga dan kepercayaan dalam tata kelola .

Di Kabupaten Bandung, lanskap pembangunan yang dinamis memerlukan kebijakan publik yang inovatif untuk mengatasi tantangan seperti meningkatkan pelayanan publik, mengelola lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Inovasi kebijakan publik yang efektif sangat bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan, yang melibatkan menggabungkan beragam aktor dengan berbagai kepentingan dan kapasitas ke dalam proses pengambilan keputusan (Rahmatullah et al., 2025) . Namun, praktik saat ini sering melihat pemerintah daerah mendominasi inovasi kebijakan, membatasi integrasi aktor non-pemerintah yang dapat memberikan keahlian dan sumber daya yang berharga . Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih baik yang mencerminkan kebutuhan masyarakat (Simanungkalit & Prasojo, 2020). Selain itu, mendorong partisipasi warga negara dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan, memastikan mereka lebih responsif terhadap prioritas lokal . Kemitraan publik-swasta (PPP) juga menghadirkan peluang untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian sektor swasta, lebih lanjut mendorong inovasi dalam pemberian layanan publik (Fidowaty et al., 2018).

Jaringan kebijakan saat ini di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya dioptimalkan untuk inovasi kebijakan publik, yang menghambat pengembangan solusi adaptif terhadap kebutuhan lokal. Untuk meningkatkan proses ini, penting untuk menerapkan struktur jaringan yang inklusif dan kolaboratif. Tata kelola inklusif memastikan bahwa beragam pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan, memungkinkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mempromosikan kesetaraan sosial (Wicaksono, 2021). Selain itu, pembuatan kebijakan kolaboratif memanfaatkan keahlian berbagai

pemangku kepentingan, mendorong kepemilikan dan akuntabilitas, yang dapat mengarah pada hasil yang lebih berkelanjutan (Nunung et al., 2025) . Dengan mengoptimalkan struktur jaringan, pembuat kebijakan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, pada akhirnya memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan inovatif . Selain itu, melakukan penilaian kebutuhan lokal sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan tantangan unik kawasan, memastikan bahwa keduanya relevan dan efektif (Langbroek & Verhoest, 2024) . Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jejaring kebijakan sebagai strategi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian jejaring kebijakan dan inovasi kebijakan publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi inovasi kebijakan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Jejaring Kebijakan**

Jejaring kebijakan (policy networks) merupakan pendekatan yang memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi antaraktor yang saling bergantung dalam suatu struktur hubungan yang relatif stabil. Rhodes (1997) mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai pola hubungan antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan publik, di mana tidak ada satu aktor pun yang memiliki kendali penuh terhadap kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pertukaran sumber daya, informasi, dan pengaruh antaraktor.

Marsh dan Rhodes (2019) mengemukakan bahwa jejaring kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tipe, mulai dari jejaring yang bersifat tertutup hingga jejaring yang lebih terbuka dan dinamis. Dalam konteks pemerintahan daerah, jejaring kebijakan cenderung melibatkan aktor yang beragam, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan akademisi. Keberagaman aktor ini memungkinkan terciptanya kolaborasi dan sinergi dalam proses kebijakan.

### **2. Inovasi Kebijakan Publik**

Inovasi kebijakan publik merujuk pada pembaruan dalam ide, proses, maupun praktik kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Menurut Osborne dan Brown (2011), inovasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan penciptaan kebijakan baru, tetapi juga dengan perubahan cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan aktor lain. Inovasi menjadi penting dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.

Inovasi kebijakan publik di tingkat daerah dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kepemimpinan, serta keterlibatan aktor non-pemerintah. Pemerintah daerah yang mampu mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama cenderung lebih inovatif dalam merumuskan kebijakan publik. Inovasi kebijakan juga berfungsi sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Dalam konteks ini, jejaring kebijakan berperan sebagai wahana utama bagi inovasi kebijakan publik. Melalui jejaring kebijakan, berbagai aktor dapat berkontribusi dalam pertukaran gagasan, pengetahuan, dan sumber daya yang mendorong munculnya solusi kebijakan yang inovatif. Dengan demikian, inovasi kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas jejaring kebijakan yang terbentuk.

### **3.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran jejaring kebijakan sebagai strategi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung, khususnya dalam melihat pola interaksi, kolaborasi, dan pertukaran sumber daya antaraktor kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung dengan fokus pada inovasi kebijakan publik yang melibatkan jejaring kebijakan. Fokus kajian diarahkan pada interaksi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan aktor lain yang berperan dalam mendorong inovasi kebijakan publik di tingkat daerah.

### **4.HASIL & PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat di Identifikasi Permasalahan Empiris Inovasi Kebijakan Publik di Kabupaten Bandung

Inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung masih cenderung didominasi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama. Keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan akademisi, masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam jejaring kebijakan. Kondisi ini menyebabkan inovasi kebijakan lebih bersifat top-down dan kurang mencerminkan kebutuhan serta potensi lokal.

Permasalahan empiris lainnya adalah lemahnya koordinasi antaraktor dalam jejaring kebijakan. Hubungan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) maupun antara OPD dan aktor non-pemerintah belum berjalan secara optimal. Jejaring kebijakan yang terbentuk masih

bersifat sektoral dan parsial, sehingga pertukaran informasi dan pembelajaran bersama dalam proses inovasi kebijakan belum berlangsung secara efektif.

Aktor non-pemerintah yang terlibat dalam inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung masih menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari sisi sumber daya manusia, pendanaan, maupun akses terhadap proses pengambilan keputusan. Keterbatasan ini menghambat peran strategis mereka dalam jejaring kebijakan dan berdampak pada rendahnya kualitas inovasi kebijakan yang dihasilkan.

Kolaborasi antaraktor dalam inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung sering kali bersifat temporer dan berbasis proyek. Belum terdapat mekanisme jejaring kebijakan yang berkelanjutan dan terinstitusionalisasi. Akibatnya, inovasi kebijakan sulit direplikasi atau dikembangkan dalam jangka panjang.

Proses inovasi kebijakan publik masih dihadapkan pada hambatan regulasi dan prosedur birokrasi yang kaku. Ketentuan administratif yang kompleks sering kali membatasi ruang eksperimentasi dan kreativitas dalam inovasi kebijakan. Kondisi ini melemahkan fleksibilitas jejaring kebijakan dalam merespons permasalahan publik secara cepat dan adaptif.

## **Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya ditopang oleh jejaring kebijakan yang inklusif dan kolaboratif. Dominasi pemerintah daerah dalam proses inovasi kebijakan mencerminkan karakter jejaring kebijakan yang masih bersifat hierarkis. Hal ini sejalan dengan pandangan Rhodes (1997) yang menyatakan bahwa efektivitas jejaring kebijakan sangat bergantung pada tingkat ketergantungan dan keseimbangan peran antaraktor. Ketika pemerintah daerah memegang kendali dominan, potensi inovasi yang bersumber dari aktor non-pemerintah menjadi kurang optimal.

Pemerintah Kabupaten Bandung perlu membentuk atau memperkuat forum jejaring kebijakan yang bersifat lintas sektor dan berkelanjutan. Forum ini berfungsi sebagai ruang kolaborasi resmi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan akademisi. Kelembagaan jejaring kebijakan yang jelas akan memperkuat koordinasi, memperluas partisipasi aktor, serta mendorong pertukaran ide dan sumber daya yang menjadi fondasi inovasi kebijakan publik.

Lemahnya koordinasi dan sinergi antaraktor juga menunjukkan bahwa struktur jejaring kebijakan di Kabupaten Bandung belum berkembang menjadi jejaring yang terbuka

dan dinamis sebagaimana dikemukakan oleh Marsh dan Rhodes (1992). Jejaring yang bersifat sektoral dan parsial membatasi aliran informasi dan pembelajaran bersama, sehingga inovasi kebijakan cenderung bersifat inkremental dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks inovasi kebijakan publik, keterbukaan jejaring merupakan prasyarat utama bagi munculnya ide-ide baru dan solusi kreatif. Solusi penting lainnya adalah peningkatan kapasitas aktor non-pemerintah melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses informasi kebijakan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mendorong kesetaraan peran antaraktor dalam jejaring kebijakan. Dengan kapasitas yang memadai, aktor non-pemerintah dapat berkontribusi lebih aktif dalam perumusan dan implementasi inovasi kebijakan publik.

Keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah memperkuat ketimpangan dalam jejaring kebijakan. Perspektif jejaring kebijakan menekankan bahwa aktor-aktor dalam jejaring seharusnya memiliki akses relatif setara terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Ketika aktor non-pemerintah memiliki kapasitas yang lemah, kontribusi mereka dalam proses inovasi kebijakan menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kolaborasi dan minimnya keberagaman perspektif dalam perumusan kebijakan. Jejaring kebijakan perlu didukung oleh mekanisme kolaborasi yang partisipatif dan transparan. Proses perumusan inovasi kebijakan sebaiknya melibatkan aktor jejaring sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan model tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan dialog tatap muka, kepercayaan, dan komitmen bersama sebagai kunci keberhasilan kolaborasi kebijakan.

Selain itu, minimnya mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa jejaring kebijakan di Kabupaten Bandung belum terinstitusionalisasi secara memadai. Padahal, menurut pendekatan inovasi kebijakan publik, inovasi membutuhkan ruang eksperimentasi yang berkelanjutan dan pembelajaran kolektif. Jejaring kebijakan yang hanya bersifat temporer tidak mampu menopang proses inovasi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan penyesuaian regulasi dan prosedur birokrasi agar lebih adaptif terhadap inovasi kebijakan. Penyederhanaan regulasi akan membuka ruang eksperimentasi bagi aktor jejaring kebijakan dan mendorong munculnya solusi kebijakan yang kreatif. Regulasi yang fleksibel juga memperkuat kemampuan jejaring kebijakan dalam merespons permasalahan publik secara cepat.

Hambatan regulasi dan birokrasi yang kaku semakin mempersempit ruang inovasi dalam jejaring kebijakan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip inovasi kebijakan publik yang menekankan fleksibilitas dan adaptivitas. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan jejaring kebijakan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan

merupakan prasyarat penting bagi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Solusi terakhir adalah menginstitutionalisasi mekanisme pembelajaran bersama (collective learning) dalam jejaring kebijakan. Evaluasi bersama, berbagi praktik baik, dan refleksi kebijakan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan inovasi kebijakan publik. Pembelajaran bersama akan memperkuat kepercayaan antaraktor dan meningkatkan kualitas jejaring kebijakan di Kabupaten Bandung.

## 5.KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Namun demikian, praktik inovasi kebijakan yang berlangsung belum sepenuhnya ditopang oleh jejaring kebijakan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dominasi pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah, serta hambatan regulasi dan birokrasi menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi jejaring kebijakan sebagai strategi inovasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kualitas interaksi dan keseimbangan peran antaraktor dalam jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan yang bersifat hierarkis dan sektoral cenderung menghasilkan inovasi yang terbatas dan kurang berkelanjutan. Sebaliknya, jejaring kebijakan yang terbuka dan terinstitutionalisasi mampu mendorong pertukaran gagasan, pembelajaran bersama, serta kolaborasi yang lebih efektif dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, penguatan jejaring kebijakan melalui pembentukan forum kolaboratif, peningkatan kapasitas aktor, penyederhanaan regulasi, serta institutionalisasi pembelajaran bersama menjadi langkah penting untuk meningkatkan inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi inovasi kebijakan publik yang berbasis jejaring kebijakan dan berorientasi pada keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cabot, P. E., Flynn, N. E., Osborne, B., Waskom, R. M., Bovee, B., Brown, D., & Gingerich, L. Alternative transfer methods in Colorado: status update, framework for continued support, and recommendations for CWCB action.
- Fidowaty, T., Nazsir, N., Suwaryo, U., & Deliarnoor, N. A. (2018). *Policy Implementation Of Green Space In Bandung City Seen From Power, Interest, And Strategies Of Actor*

- Involved Factor (Study About Park and City Forest)*. 78–82.  
<https://doi.org/10.2991/ICOPOSDEV-17.2018.17>
- Ilhami, R. (2023). *Policy Network Actors as Units of Public Policy Analysis*. 1(02), 103–111.  
<https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v1i02.288>
- Ilhami, R. (2023). Strengthening Policy Networks to Create Effective Public Policies. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.143>
- Langbroek, T., & Verhoest, K. (2024). *It is all about interaction: network structure, actor importance, and the relation to innovative outcomes* (pp. 218–239). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803923895.00021>
- Marsh, D., & Stoker, G. (2019). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.
- Nunung, A., Latifah, L., Fatmawati, F., & Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 10(1), 62–82. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>
- Patria, Y. M., & Suwarta, F. (2024). Inovasi Kebijakan Publik Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(2), 101–111. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i2.3610>
- Rahmatullah, A., Zuhri, M. A., & Yuningsih, N. Y. (2025). Peran aktor lokal dan hambatan pemberdayaan masyarakat di desa ciheulang kabupaten bandung dalam dinamika kebijakan pusat dan lokal tahun 2019-2025. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 5966–5974. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47433>
- Rhodes, R. A. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University.
- Simanungkalit, D. J., & Prasojo, E. (2020). *Peran badan penelitian dan pengembangan kementerian dalam negeri dalam mengimplementasikan inovasi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah*. 5(2), 1–9.  
<https://doi.org/10.33701/JIPSK.V5I2.1268>

- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang city within the framework Rebana triangle economic region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68-83.
- Syuaib, M. R. (2023). Policy and innovation network: a study of inter-agency collaboration in post-disaster rehabilitation and reconstruction in the Central Sulawesi, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 289–301. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.11567>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *Social*, 5(2), 610–621. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- Wicaksono, F. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KREATIVITAS MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.5076>